

WORLD BANK ASSISTANCE IN ADDRESSING WATER AND SANITATION PROBLEMS IN RIAU THROUGH THE COMMUNITY-BASED DRINKING WATER AND SANITATION PROGRAM (PAMSIMAS III)

Oleh : Karotriyana Br. Simbolon
Pembimbing: Dr. Mhd Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The clean water and sanitation crisis is an issue that is still the focus of the international community, because it can affect national and global activities. The problem of clean water and sanitation is also still a big problem that continues to be faced by Indonesia. Limited funds to increase the development of access to clean water and sanitation facilities that are evenly distributed is the reason Indonesia needs assistance from outside parties to help overcome these problems. This research will describe how the World Bank as an international financial organization helps address water and sanitation problems in Indonesia through the PAMSIMAS III program.

This study uses descriptive qualitative method and data collection techniques for documentary studies and literature studies. In analyzing this topic, researcher use the perspective of institutional liberalism with the level of international system analysis and foreign aid theory in the form of grants and loans.

This research shows that the World Bank's financial assistance in the PAMSIMAS III program is considered effective in increasing access to clean water services and improving healthy sanitation facilities in Indonesia, specially in Riau Province. This can be seen from the increasing percentage of households that have access to clean water services and the increasing number percentage of households that have access to sanitation.

Keywords: *Foreign Aid, World Bank, Riau, Clean Water and Sanitation, PAMSIMAS III*

PENDAHULUAN

Pemanasan global atau *Global Warming* merupakan kajian hubungan internasional yang beberapa tahun belakangan ini menjadi fokus perhatian bagi dunia internasional. Dampak dari pemanasan global dapat mempengaruhi perubahan iklim sehingga menyebabkan kelangkaan air.¹ Kelangkaan air merupakan isu lingkungan yang saat ini sedang melanda sekitar 40% penduduk dunia termasuk Indonesia, yang terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah permukaan air mencapai 70% dari luas wilayahnya.² Namun sebagian besar kualitas air di wilayah Indonesia dalam keadaan tercemar.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PPKL Indonesia di tahun 2016 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air di Indonesia pada tahun tersebut sebesar 60,38% dan masuk kedalam kategori tidak layak karena berada jauh dibawah indeks kelayakan air bersih yaitu lebih dari 70%.³ Terlihat dari beberapa wilayah di Indonesia yang kualitas airnya didominasi oleh warna kuning (tercemar ringan) dan berwarna biru (tercemar sedang) bahkan di beberapa daerah lagi berwarna merah (tercemar berat).

Menurut data dari BPS tahun 2016 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses air minum yang layak dan berkelanjutan (di bawah 40%) sebanyak 61,57%. Sementara rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi

layak berkelanjutan (40% bawah) sebanyak 52,39%. Namun proporsi rumah tangga yang menggunakan air minum yang aman di kota 71,29% sementara di daerah desa sebesar 55,65%. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga yang mempunyai fasilitas sanitasi yang dapat dikategorikan sehat adalah 69,08% untuk daerah perkotaan, di daerah perdesaan sebesar 41,32% dan terdapat gap di daerah perkotaan dan perdesaan.

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi dengan tingkat kekurangan air bersih yang cukup memprihatinkan di Pulau Sumatera.⁴ Berdasarkan laporan dari KLHK tahun 2016 menunjukkan bahwa, Indeks Kualitas Air (IKA) provinsi Riau berada di posisi terendah ke 12 yakni 50,75%. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Riau terletak di urutan terendah kelima di tingkat nasional dan terendah pertama di wilayah sumatera yakni sebesar 56,73%.⁵ Hal ini masuk dalam kategori sangat kurang dan berada jauh dibawah IKA dan IKLH rata-rata nasional.

Desa Air Terjun adalah desa yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang masyarakatnya masih kesulitan untuk menggunakan air bersih juga tidak mempunyai fasilitas sanitasi.⁶ Masyarakat desa Air Terjun mengandalkan air waduk dan air sungai yang ada di desa tersebut untuk pemenuhan akan kebutuhan. Namun kualitas airnya belum dapat dikatakan layak, karena airnya keruh dan berbau, tak jarang waduk dan sungai tersebut mengalami kekeringan juga kebiasaan masyarakatnya membuang air besar

¹ Jessica Martha, "Isu Kelangkaan Air dan Ancamannya Terhadap Keamanan Global", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VII, No 2, (2017), Hal 150.

² Menuju Poros Maritim https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata diakses pada 16 Juli 2020.

³ Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Atlas Status Mutu Air Indonesia Tahun 2016. Jakarta. Hal: 4.

⁴ Kualitas Air Sungai di Riau Memprihatinkan <https://www.riau.go.id/home/content/2016/10/20/6032-kualitas-air-sungai-di-riau-memprihatinkan> diakses pada 16 Juli 2020.

⁵ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016 <https://www.menlhk.go.id/site/post/1550> diakses pada 16 Juli 2020.

⁶ Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pelalawan <https://adoc.pub/buku-putih-sanitasi-bps-kabupaten-pelalawan.html>

sembarangan dalam kehidupan sehari-hari sehingga berdampak pada sanitasi tidak sehat.

Menurut data *Joint Monitoring Program* WHO-Unicef di tahun 2017 mengatakan bahwa Indonesia berada di posisi terendah kedua dalam capaian akses air minum dan sanitasi diantara negara ASEAN dan negara G-20.⁷ Untuk akses air minum baru mencapai 89% akses air layak dasar dan belum mencapai akses air aman, sedangkan untuk akses sanitasi baru mencapai 75%. Meskipun masalah air dan sanitasi bukan merupakan satu-satunya ancaman yang dihadapi Indonesia, namun penanganan masalah air bersih dan sanitasi layak menjadi agenda prioritas.

Masalah air dan sanitasi akan semakin kompleks dengan bertambahnya jumlah penduduk dan industrialisasi.⁸ Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka meningkat pula penggunaan lahan untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan serta pembangunan pabrik, sehingga kawasan resapan tidak mampu menahan sumber daya air. Akibatnya potensi air tanah menyusut dan dapat mengurangi mutu kualitas air dan sanitasi juga berpengaruh pada aspek kesehatan, sosial ekonomi. Seperti produksi pertanian, perikanan dan penggunaan sumberdaya alam terkait air juga ikut menurun.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyediakan air dan sanitasi bagi masyarakatnya. Namun masih terdapat disparitas yang signifikan pada penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perdesaan

dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dalam mendapatkan manfaat dari layanan air minum dan sanitasi yang layak.⁹ Untuk Membangun pemerataan sarana air dan sanitasi di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar sementara sumber pembiayaan terbatas, oleh karena itu pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada *World Bank*.

World Bank merupakan organisasi internasional yang menyediakan bantuan berupa pinjaman atau hibah dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR didukung oleh *World Bank* membuat sebuah program bernama Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dengan harapan dapat menambah jumlah masyarakat di wilayah perdesaan agar dapat menggunakan air bersih.

Program PAMSIMAS ini awalnya dibuat pada tahun 2008-2021 dengan target cakupan wilayah sebanyak 33 Provinsi, 412 Kabupaten, 11 Kota dan 27.000 Desa di Indonesia.¹⁰ Program ini dilaksanakan dengan bertahap, PAMSIMAS I (2008-2012) tersebar di 15 Provinsi, 110 Kabupaten dan 5.200 Desa, PAMSIMAS II (2013-2015) tersebar di 32 Provinsi, 220 Kabupaten dan 6.800 Desa, serta PAMSIMAS III (2016-2021) dengan target sasaran di 33 Provinsi, 396 Kabupaten dan 15.000 Desa di Kabupaten.

Sejak program PAMSIMAS hadir, *World Bank* telah memberikan banyak bantuan pembangunannya. Bantuan yang diberikan *World Bank* ini merupakan program bantuan pembangunan jangka

⁷ Data Akses Sanitasi ASEAN dan Negara G-20 <http://nawasis.org/portal/galeri/read/data-akses-sanitasi-asean-dan-negara-g-20/51907> diakses pada 16 Juli 2020.

⁸ Ahmad Mulyani dan Muhammad Rijal, "Industrialisasi, Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Struktur Kesehatan Masyarakat", Jurnal Biology dan Schene & Education, Vol 7, No 2, (2016), Hal 176-180.

⁹ Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH) <https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash> diakses pada 16 Juli 2020.

¹⁰ Ringkas Program-Pamsimas <http://pamsimas.org/profil/ringkas-program/> diakses pada 17 Juli 2020.

panjang, karena program PAMSIMAS adalah bagian kecil atau sebuah bentuk usaha pemerintah agar meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang juga merupakan bagian dari poin tujuan SDGs yang harus dicapai Indonesia pada tahun 2030.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya air yang melimpah namun layanan terhadap akses air bersih di beberapa wilayah di Indonesia belum merata. Masih banyak ditemui masyarakat atau rumah tangga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, juga masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mempraktikkan kebiasaan hidup bersih dan sehat, seperti rumah tangga yang ada di daerah Riau. Kondisi ini tentunya perlu ditangani dengan serius, karena kualitas air yang buruk akan mempengaruhi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat serta akan berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan di dunia.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemenuhan air dan sanitasi layak, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah layanan air dan sanitasi yang merata. Namun untuk mewujudkan pembangunan saluran air bersih dan sanitasi yang merata membutuhkan dana yang cukup besar, sementara pembiayaan terbatas. Oleh karena itu pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada *World Bank* untuk membantu menangani permasalahan air dan sanitasi yang ada di negaranya, khususnya di Provinsi Riau.

Pemerintah Indonesia didukung *World Bank* kemudian membuat sebuah program bernama Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada 2008, hingga kini program PAMSIMAS telah memasuki tahapan ketiga atau PAMSIMAS III. Dalam program PAMSIMAS III ini *World Bank* menyetujui untuk memberikan dana

tambahan guna mempercepat peningkatan jumlah akses sarana air bersih dan sanitasi sehat.

Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan, dengan fokus pada implementasi bantuan *World Bank* dalam menangani masalah air dan sanitasi di Riau PAMSIMAS III. Pertanyaan penelitian yang muncul adalah **“Bagaimana implementasi bantuan *World Bank* dalam menangani masalah air dan sanitasi di Riau melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III)?”**

KERANGKA TEORI

Dalam konteks Hubungan Internasional, terdapat berbagai sudut pandang dan teori yang memandu pemahaman terhadap dinamika global. Salah satu sudut pandang yang relevan adalah perspektif liberalisme institusional, yang menyatakan bahwa fokus Hubungan Internasional tidak terbatas pada interaksi antar negara saja, melainkan juga melibatkan aktor non-negara, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat. Teori bantuan luar negeri juga menjadi penting dalam konteks ini, mengenai bagaimana organisasi internasional bekerja sama untuk membantu mengatasi permasalahan global yang melampaui batas negara.

Perspektif Liberalisme Institusional

Perspektif yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah perspektif liberalisme institusional. Liberalisme institusional beranggapan bahwa negara adalah sebagai aktor utama dalam hubungan internasional namun keberadaan organisasi internasional juga memiliki pengaruh.¹¹ Kaum liberalisme institusional menyatakan bahwa organisasi internasional membantu meningkatkan

¹¹ Robert H. Jackson dan Georg Sorensen. 2007. *Introduction to International Relations: Theory and Approaches*. Hal 154.

kerjasama internasional diantara negara anggotanya dengan aturan yang telah disepakati demi kepentingan bersama.

Negara berupaya untuk mengoptimalkan keuntungan yang didapat melalui kerjasama dan kurang memperdulikan keuntungan yang diperoleh dari negara lain atau organisasi internasional dalam perjanjian kerjasama internasional.¹² Hambatan terbesar dalam bekerjasama antar aktor internasional adalah ketidaktaatan atau penghianatan. Oleh karena itu, liberalisme institusional menyarankan penekanan pada kerjasama melalui bentuk dan prosedur hukum internasional dan mekanisme diplomasi pada organisasi internasional.

Perspektif liberalisme institusional digunakan untuk menjelaskan bagaimana pentingnya keberadaan organisasi internasional, dalam membantu mengakomodir kebutuhan atau kepentingan yang sulit dipenuhi jika hanya melalui aktor negara.

Dalam hal ini, keberadaan *World Bank* sebagai sebuah organisasi keuangan internasional memiliki peranan penting dalam membantu menangani masalah air dan sanitasi yang terjadi di Indonesia, khususnya di provinsi Riau.

Teori Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam hubungan internasional. Bantuan luar negeri menganalisis interaksi diantara kedua aktor, yaitu negara atau organisasi internasional dan negara penerima bantuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing aktor.

Carol Lancaster dalam bukunya "*Foreign Aid, Diplomacy, Development and Domestic Politics*" mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer sumber daya dari pendonor ke negara

penerima.¹³ Sumber daya yang dimaksud adalah bantuan finansial dalam bentuk pinjaman (*Loan*) dan Hibah (*Grants*).

Pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional untuk percepatan dan pemerataan dalam membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk mewujudkannya, pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar, sementara sumber pembiayaan terbatas. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membutuhkan bantuan pembangunan (*Development Aids*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan *World Bank* Dalam Bentuk Pinjaman (*Loan*)

Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS III, *World Bank* melalui *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) memberikan bantuan berupa dana pinjaman sebesar US\$ 300.000.000 juta untuk membiayai kegiatan program PAMSIMAS III.

Dalam pembiayaannya dana pinjaman tersebut dikelompokkan kedalam 3 kategori:

1. Barang, Jasa Konsultan, Non-Layanan Konsultasi, Lokakarya dan Pelatihan US\$ 89.520.000 Juta.
2. Hibah US\$ 116.560.000 Juta
3. Layanan Konsultan dan Layanan Non-Konsultasi US\$ 93.920.000 Juta

Bantuan *World Bank* Dalam Bentuk Hibah (*Grant*)

World Bank melalui *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) juga memberikan bantuan berupa dana hibah sebesar US\$ 23.600.000 Juta untuk membiayai kegiatan PAMSIMAS III.

Dalam pembiayaannya dikelompokkan menjadi 2 kategori:

¹² Donahue, J and Nye, J, ed., *Governance in a Globalizing World*, Brookings Institution Press, Washington DC, 2000

¹³ Carol Lancaster. 2007. "*Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*". London: University of Chicago Press. Hal. 9.

1. Barang, Jasa Konsultan, Lokakarya dan Pelatihan US\$ 6.240.000 Juta.
2. Hibah US\$ 17.360.000 Juta.

Implementasi Bantuan *World Bank* Dalam Program PAMSIMAS III DI Riau

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwasanya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana air minum dan sanitasi yang aman, sesuai Standar Pelayanan Minimal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan air dan sanitasi masuk kedalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2016 yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, melalui penyediaan infrastruktur air minum yang aman dan sanitasi yang sehat.¹⁴

Untuk mengatasi permasalahan air dan sanitasi yang terjadi di daerahnya, Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan program nasional yang disebut Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Yakni program dari Pemerintah Pusat dan didukung oleh *World Bank*, untuk menambah jumlah layanan air bersih dan sanitasi bagi masyarakatnya.

Kehadiran Program PAMSIMAS III di Provinsi Riau berawal dari keinginan atau minat Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam Program PAMSIMAS, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau mengajukan proposal usulan minat atas program PAMSIMAS III yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini *Central Project Management Unit* (CPMU)/Kementerian PUPR. Kementerian

PUPR kemudian melakukan verifikasi proposal usulan tersebut dan menetapkan hasil bahwa Provinsi Riau sebagai salah satu Provinsi yang berhasil mendapatkan Program PAMSIMAS III.

Kemudian atas usulan tersebut Tim pusat PUPR, *World Bank* dan konsultan juga melakukan peninjauan verifikasi atas nama-nama desa yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yang dinilai memenuhi kriteria desa sasaran PAMSIMAS. Setelah hasil validasi lapangan tersebut selesai kemudian dana pusat atas *Loan Agreement World Bank* melalui Kementerian PUPR disalurkan ke daerah-daerah yang telah disetujui.

Di Provinsi Riau, Program PAMSIMAS hadir sejak dilaksanakannya program PAMSIMAS I dan telah menyebar di 1.304 desa yang ada di Provinsi Riau. Saat ini, program PAMSIMAS telah berada di periode ke III yang mana pada program PAMSIMAS III ini dikhususkan untuk desa-desa kabupaten yang belum mempunyai akses ke sarana air bersih atau layanan air minum belum mencapai 100%. Seperti desa-desa yang berada di 10 Kabupaten di Riau yang mendapatkan program PAMSIMAS III.

Hibah Khusus PAMSIMAS (HKP)

Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS III di Riau, Provinsi Riau mendapat bantuan dana Hibah Khusus PAMSIMAS (HKP) sebesar Rp. 3.798.151.000 pada tahun 2018, yang dikhususkan untuk 8 Kabupaten yang ada di Riau, yaitu: Kuantan Singingi Rp. 498.909.000, Indragiri Hilir Rp. 300.000.000, Indragiri Hulu Rp. 400.000.000, Kepulauan Meranti Rp. 300.000.000, Siak Rp. 134.347.000, Kampar Rp. 1.000.000.000, Rokan Hulu Rp. 864.895.000, Dumai Rp. 300.000.000.

Pada tahun 2019, Provinsi Riau mendapatkan bantuan berupa dana Hibah Khusus PAMSIMAS (HKP) sebesar Rp. 5.981.367.000 yang diperuntukkan bagi 8 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau

¹⁴ Kabupaten Pelalawan. 2016. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021. Pemerintah Kabupaten Pelalawan: Pangkalan Kerinci.

dengan rincian biaya sebagai berikut: Kuantan Singingi Rp. 812.000.000, Indragiri Hulu Rp. 1.580.000.000, Kepulauan Meranti Rp. 300.000.000, Pelalawan Rp. 550.000.000, Bengkalis Rp. 916.900.000, Kampar Rp. 500.000.000, Rokan Hulu Rp. 1.072.467.000, Dumai Rp. 250.000.000.

Hibah Khusus PAMSIMAS (HKP) adalah varian dari Hibah Insentif Daerah (HIK). Hibah Khusus PAMSIMAS ini diberikan untuk mendukung peningkatan layanan SPAM di perdesaan serta menjamin kesinambungan dari program PAMSIMAS. Hibah diberikan kepada Kabupaten yang telah mengadopsi PAMSIMAS namun masih memerlukan bantuan dana untuk membangun SPAM. Pendanaan HKP melengkapi pendanaan APBD dan hibah masyarakat untuk meningkatkan kesinambungan layanan air minum dengan meningkatkan layanan dan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Kemudian pada tahun 2021 Provinsi Riau kembali mendapatkan bantuan dana Hibah Khusus PAMSIMAS (HKP) sebesar Rp. 2.267.000.000, namun hanya diperuntukkan untuk 2 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, yaitu: Indragiri Hulu Rp. 900.000.000, Kampar Rp. 1.367.000.000.

Pengelolaan Program PAMSIMAS III di Riau dikelompokkan menjadi lima kategori kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan Daerah dan Desa

Kegiatan yang dimaksud mencakup kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan dalam pelaksanaan program PAMSIMAS, serta memastikan agar program PAMSIMAS ini dapat terus berlanjut. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas

fasilitator (*Capacity Building*) yang dilaksanakan oleh perwakilan Kepala Dinas Pengembangan Sistem Air Minum Provinsi Riau dan dengan dihadiri oleh 183 peserta, 14 Kabupaten Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.¹⁵ Kegiatan-kegiatan seperti ini penting dilakukan agar menambah tingkat ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan dalam pelaksanaan program sesuai dengan pedoman PAMSIMAS.

2. Peningkatan perilaku dan layanan hidup bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

Bagian ini bertujuan mendukung masyarakat dan entitas lokal agar mencegah datangnya penyakit yang diakibatkan buruknya kualitas air dan sanitasi yang tidak memadai, contohnya adalah diare. Upaya dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengubah perilaku menuju hidup bersih dan sehat (PHBS) serta meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dalam proses sosialisasi ini, tim dari Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Direktur Kesehatan Masyarakat, Area Pelayanan Terpadu (Apt), dan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, melaksanakan kegiatan sosialisasi di desa Sumber Makmur, Tapung, Kampar.¹⁶ Tujuan sosialisasi ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan gaya hidup sehat di desa

¹⁵ Peningkatan Kapasitas Fasilitator PAMSIMAS Provinsi Riau dan Kepulauan Riau <https://pamsimas.pu.go.id/peningkatan-kapasitas-fasilitator-pamsimas-provinsi-riau-dan-kepulauan-riau/> Diakses pada 10 Mei 2023.

¹⁶ Kemenkes Bersama Dinkes Riau Sosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kepada Masyarakat Desa Sumber Makmur Kampar <https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/4938-kemenkes-bersama-dinkes-riau-sosialisasikan-gerakan-masyarakat-hidup-sehat-kepada> diakses pada 10 Mei 2023.

tersebut, dengan mengamalkan kebiasaan hidup yang bersih dan menjaga kesehatan guna mencegah berbagai penyakit yang timbul akibat kondisi sanitasi yang tidak memadai, seperti diare, stunting, TBC, dan penyakit lainnya.

3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi

Aspek ini membantu meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari adanya akses ke sumber air yang aman untuk dikonsumsi dan fasilitas sanitasi di lingkungan sekolah, juga sejalan dengan upaya mencapai akses air minum dan sanitasi yang merata. Realisasi dari aspek ini mencakup upaya untuk menyediakan sarana air dan pemasangan fasilitas sanitasi di daerah pedesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2020, Bupati Pelalawan secara resmi meluncurkan proyek penyediaan air bersih di tujuh desa yang menerima bantuan dana berupa Hibah Insentif Desa (HID). Selain itu, tiga desa lainnya juga menerima bantuan dana berupa Hibah Khusus PAMSIMAS (HKP).¹⁷ Peluncuran ini berlangsung di Desa Sidomukti yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras.

4. Hibah Insentif

Pada aspek hibah ini bertujuan memberikan hadiah berupa tambahan dana bagi desa-desa di Kabupaten yang berhasil mengelola saluran yang berkelanjutan terhadap air dan sanitasi, serta memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM). Dukungan ini diberikan sebagai bagian dari usaha menggabungkan pendekatan berbasis masyarakat ke dalam program

pemberian air dan sanitasi di daerah pedesaan. Bagian ini berkontribusi secara langsung dalam mempercepat kemajuan terhadap akses air minum dan sanitasi yang merata di pedesaan melalui pendekatan komunikasi dengan masyarakat.

Pada tahun 2020, Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek air minum menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Koordinator Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) di kantor PIP2B Provinsi Riau.¹⁸ Dalam hal ini, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau berhasil memperoleh bantuan alokasi dana untuk program PAMSIMAS reguler yang ditujukan untuk desa-desa yang terletak di enam Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Selain itu, beberapa desa di kabupaten/kota juga menerima Hibah Khusus PAMSIMAS (HKP), seperti Indragiri Hulu, Pelalawan, Bengkalis, Dumai, serta sepuluh Kabupaten dan Kota mendapatkan dana Hibah Insentif Desa (HID) sehingga total keseluruhan desa yang mendapatkan bantuan sebanyak 139 desa.

5. Dukungan Pelaksanaan dan pengelolaan program

Sasaran pada bagian ini ditujukan untuk memberikan support yang terorganisir dalam mengelola kegiatan poin 1, 2, 3 dan 4 yang menjadi fokus dalam program PAMSIMAS, serta membagikan tambahan ilmu pengetahuan melalui bimbingan pelatihan kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Central Project Implementation Unit* (CPIU) agar menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar sesuai prosedur PAMSIMAS.

¹⁷ Bupati Pelalawan Riau Resmikan Resmikan Sarana Air Minum di 10 Desa <https://pamsimas.pu.go.id/bupati-pelalawan-riau-resmikan-sarana-air-minum-di-10-desa/> diakses pada 10 Mei 2023.

¹⁸ Penandatanganan PKS PAMSIMAS Reguler, HKP dan HID TA 2020 di Riau <https://pu.go.id/berita/penandatanganan-pks-pamsimas-reguler-hkp-dan-hid-ta-2020-di-riau> diakses pada 10 Mei 2020.

SIMPULAN

World Bank, sebuah organisasi internasional yang memberikan bantuan keuangan internasional dalam bentuk hibah atau pinjaman untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang yang memerlukan bantuan finansial, termasuk Indonesia. *World Bank*, sebagai lembaga keuangan internasional, menyetujui untuk membantu Indonesia dalam mengatasi masalah air bersih dan sanitasi. *World Bank* telah memberikan dukungan kepada Indonesia melalui program PAMSIMAS sejak tahun 2008. Bentuk bantuan dari *World Bank* tetap tidak berubah, dengan bantuan berupa dana hibah dan pinjaman.

Berdasarkan teori bantuan luar negeri yang dikemukakan oleh Carol Lancaster, menyatakan bahwasanya bantuan luar negeri adalah transfer sumber daya berupa pinjaman (*Loan*) dan hibah (*Grant*) dari pemberi bantuan kepada negara penerima, *World Bank* memberikan bantuan finansial dalam bentuk pinjaman senilai US\$300 juta dan hibah senilai US\$23,6 juta untuk program PAMSIMAS III di Indonesia. Aliran dana hibah dari *World Bank* di Riau tersebar ke berbagai desa. Pada tahun 2018, dana tersebut tersebar ke 41 desa di Riau; pada tahun 2019, mencapai 42 desa; dan pada tahun 2021, dialokasikan untuk 14 desa di Riau. Pengurangan jumlah desa yang menerima dana hibah pada tahun 2021 disebabkan karena desa-desa pada tahun sebelumnya dianggap telah berhasil memenuhi standar kelayakan air bersih dan sanitasi di Indonesia.

Dalam penjelasan mengenai program bantuan PAMSIMAS, terdapat perbedaan kategori pembiayaan antara pinjaman dan hibah dari *World Bank*. Pada pinjaman, terdapat tiga kategori pembiayaan: 1) Barang, jasa konsultan, layanan non-konsultasi, lokakarya, dan pelatihan; 2) Hibah; 3) Layanan Konsultan dan Layanan

non-konsultasi. Sementara itu, dana hibah terbagi menjadi dua kategori: 1) Barang, jasa konsultan, lokakarya, dan pelatihan; 2) Hibah.

Bantuan yang diberikan oleh *World Bank* dalam program PAMSIMAS III telah berkontribusi dalam meningkatkan akses layanan air bersih dan memperbaiki fasilitas sanitasi yang memadai di Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum yang layak dan berkelanjutan (40% terbawah) serta peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan (40% terbawah). Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa program PAMSIMAS III memiliki dampak positif terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Indonesia, khususnya di Riau. Riau mengalami peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak dan berkelanjutan (40% terbawah), naik dari 69,60% pada tahun 2016 menjadi 90,78% pada tahun 2021.

Referensi

Jurnal

Ahmad Mulyani dan Muhammad Rijal, "Industrialisasi, Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Struktur Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Biology dan Schene & Education*, Vol 7, No 2, (2016), Hal 176-180.

Jessica Martha, "Isu Kelangkaan Air dan Ancamannya Terhadap Keamanan Global", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VII, No 2, (2017), Hal 150.

Buku

Carol Lancaster. 2007. "*Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*". London: University of Chicago Press. Hal. 9.

Donahue, J and Nye, J, ed., *Governance in a Globalizing World*, Brookings

Institution Press, Washington DC, 2000

Robert H. Jackson dan Georg Sorensen. 2007. *“Introduction to International Relations: Theory and Approaches”*. Hal 154.

Laporan Resmi

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pelalawan <https://adoc.pub/buku-putih-sanitasi-bps-kabupaten-pelalawan.html>

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Atlas Status Mutu Air Indonesia Tahun 2016. Jakarta. Hal: 4.

Kabupaten Pelalawan. 2016. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021. Pemerintah Kabupaten Pelalawan: Pangkalan Kerinci.

Website

Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH) <https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash> diakses pada 16 Juli 2020.

Bupati Pelalawan Riau Resmikan Resmikan Sarana Air Minum di 10 Desa <https://pamsimas.pu.go.id/bupati-pelalawan-riau-resmikan-sarana-air-minum-di-10-desa/> diakses pada 10 Mei 2023.

Data Akses Sanitasi ASEAN dan Negara G-20 <http://nawasis.org/portal/galeri/read/data-akses-sanitasi-asean-dan-negara-g-20/51907> diakses pada 16 Juli 2020.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016 <https://www.menlhk.go.id/site/post/1550> diakses pada 16 Juli 2020.

Kemenkes Bersama Dinkes Riau Sosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kepada Masyarakat

Desa Sumber Makmur Kampar <https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/4938-kemenkes-bersama-dinkes-riau-sosialisasikan-gerakan-masyarakat-hidup-sehat-kepada> diakses pada 10 Mei 2023.

Kualitas Air Sungai di Riau Memprihatinkan <https://www.riau.go.id/home/content/2016/10/20/6032-kualitas-air-sungai-di-riau-memprihatinkan> diakses pada 16 Juli 2020.

Menuju Poros Maritim https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata diakses pada 16 Juli 2020.

Penandatanganan PKS PAMSIMAS Reguler, HKP dan HID TA 2020 di Riau <https://pu.go.id/berita/penandatanganan-pks-pamsimas-reguler-hkp-dan-hid-ta-2020-di-riau> diakses pada 10 Mei 2020.

Peningkatan Kapasitas Fasilitator PAMSIMAS Provinsi Riau dan Kepulauan Riau <https://pamsimas.pu.go.id/peningkatan-kapasitas-fasilitator-pamsimas-provinsi-riau-dan-kepulauan-riau/> Diakses pada 10 Mei 2023.

Ringkas Program-Pamsimas <http://pamsimas.org/profil/ringkas-program/> diakses pada 17 Juli 2020.